



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

Nomor : 1331/KPN.W2.U16/UND.PW1.1/X/2024 Simalungun, 23 Oktober 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Monitoring dan Evaluasi Tindak
Lanjut 3 Unsur Terendah Survei IKM
dan IPAK Triwulan III Tahun 2024

- Yth. 1. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
2. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
3. Staf Pelaksana pada Pengadilan Negeri Simalungun
4. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun

di Tempat

Bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk hadir:

pada hari, tanggal : Kamis, 24 Oktober 2024
waktu : 10.00 WIB
tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri
Simalungun
agenda : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut 3 Unsur
Terendah Survei IKM dan IPAK Triwulan III Tahun
2024

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya
diucapkan terima kasih.

Simalungun, 23 Oktober 2024
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,


Erika Sari Emsah Ginting

Tembusan :

1. Arsip



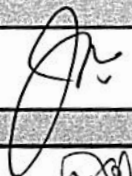
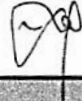
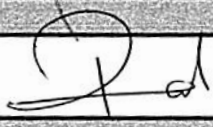
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

DAFTAR HADIR
MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT 3 UNSUR TERENDAH
SURVEI IKM DAN IPAK TRIWULAN III TAHUN 2024

HARI : KAMIS
TANGGAL : 24 OKTOBER 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Erika S.E. Ginting	KPN	
2	Ida Maryam Haribuan	Hakim	
3	Widi Astuti	Hakim	
4	Aqung Cay #21	Hakim	
5	Ronald Juen	Panet per	
6	Apolla Manung	PS	
7	IKA ASTUTI	JSPR	
8	Daniel. Praban.	JSP	
9	M. Afandi	PPNPN	
10	Andus R. Tambunan	PPNPN	

11	Dede AFANDI	PPNPN	Ref
12	Roland C.A Siahaan	PPNPN	Ref
13	Mba D. R. Siregar	T.S.P	Ref
14	Patricia Johana Lumbantobing	P.L.O	Ref
15	Ade Triani Saragih	P.P.P	Ref
16	Artha . s. Saragih	CPNS	Ref.
17	Apriyanti saragih	PPNPN	Ref
18	Laabrina Arifonang	Arsiparis	Ref
19	Heni Silalahi	CPNS	Ref
20	Isi Wardeni	PPNPN	Ref.
21	Jelis Wurn	PTK	Ref
22	Farhan Saragih	Ref	Ref
23	Henriaty. S	Ref	Ref
24	Miseni	CPNS	Ref:
25	Freudy A.	P.L.O	Ref
26	Vosi HC	PTK	Ref

27	Sornya RA	fasub Bay keportu	
28	Guy afiani S	kedsub umum & kaw	
29	Hla Mona	kasub PTIP	
30	M. R. Panghri	PPW pu	
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN


ERIKA SARI EMSAH GINTING



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

NOTULA

Dasar : 1. Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Tiga Unsur Terendah Survei IKM dan IPAK Triwulan III Tahun 2024 Nomor 1331/KPN/W2.U16/UND.PW1.1//X/2024

Hari : Kamis

Tanggal : 24 Oktober 2024

Pukul : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun

Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Tiga Unsur Terendah Survei IKM dan IPAK Triwulan III Tahun 2024

**Peserta Rapat : 1. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
2. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
3. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
4. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun**

Jalannya rapat :

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sebagai pimpinan rapat membuka rapat dan menjelaskan alasan diadakannya rapat.

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun membua rapat dan menjelaskan alasan diadakannya rapat. Rapat diadakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tiga unsur terendah survei IKM dan IPAK Triwulan III Tahun 2024.

Hakim Pengawas Kepaniteraan Hukum mendapatkan tiga unsur terendah hasil Survei kepuasan masyarakat dan Survei persepsi anti korupsi Triwulan III Tahun 2024.

- Untuk tiga unsur terendah Survei kepuasan masyarakat yaitu mengenai waktu pelayanan kesesuaian syarat dan kemudahan prosedur pelayanan.
- Tindak lanjut atas tiga unsur terendah tersebut adalah :

1. Bahwa waktu pelayanan tetap diberikan sesuai dengan SOP waktu pemberian layanan yang telah diatur dalam SOP dan jika pun layanan yang diberikan melebihi waktu yang sudah ditentukan, petugas memberikan alasan yang jelas dan tepat langsung kepada pengguna layanan.

2. Untuk unsur kedua tindak lanjutnya yaitu indikator persyaratan atas berbagai jenis layanan telah disosialisasikan menggunakan media online (*website*), layar slide yang terletak pada PTSP Pengadilan Negeri Simalugun dan tindak lanjut Pimpinan selalu mengingatkan agar setiap petugas PTSP dan meja informasi memberikan dan menginformasikan dengan baik dan jelas persyaratan untuk suatu layanan termasuk dalam proses pemberian layanan haruslah dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalugun dengan bahasa yang santun dan rinci serta tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
 3. Untuk unsur terendah ketiga tindak lanjutnya adalah kemudahan prosedur layanan bagian yang tidak terpecahkan dengan pelayanan PTSP sehingga Ketua Pengadilan Negeri Simalugun dalam setiap aksi ZI dan apel selalu mengingatkan petugas layanan agar mengutamakan pelayanan kepada pengguna layanan agar pengguna layanan bisa meraskan langsung kemudahan prosedur tanpa bertele-tele dan dengan SOP tentang waktu pelayanan yang dibutuhkan dalam memberikan layanan.
- Tiga unsur terendah survei persepsi anti korupsi adalah terkait tarif resmi tanpa ada biaya tambahan, kemudian dalam memperoleh informasi terkait biaya dan terkait biaya penerimaan bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran yang dipungut biaya/PNBP.
 - Tindak lanjut tiga unsur terendah survei persepsi anti korupsi adalah bahwa pengguna layanan dipengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa biaya tambahan sesuai SK KPN Nomor 7/KPN/SK/2021 yang diumumkan di Website Pengadilan Negeri Simalugun. Untuk unsur kedua, tindak lanjutnya adalah pengguna layanan selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya, dapat diakses melalui *website* ataupun petugas layanan di Pengadilan. Untuk unsur ketiga tindak lanjutnya adalah bahwa layanan yang membutuhkan biaya selalu menggunakan kwitansi dan tanda terima, dan Pimpinan Pengadilan tetap mengingatkan petugas PTSP setiap apel demikian juga penganggunjawab PTSP.
 - Sebagai data dukung dilampirkan tangkap layar tampilan website yang berkaitan dengan tindak lanjut tiga unsur terendah Survei IKM dan IPAK.

Ketua Pengadilan Negeri Simalugun sebagai pimpinan rapat menegaskan untuk menjaga kode etik dan disiplin kerja, tidak menerima gratifikasi dan suap khususnya dalam menangani perkara, dan dalam memberikan laporan.

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sebagai pimpinan rapat menutup rapat.
Rapat selesai.

Simalungun, 24 Oktober 2024

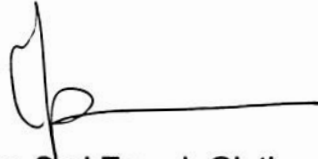
Mengetahui,

Notulis,

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,



Gabriella Aritonang
NIP. 199809232023212004



Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.
NIP. 197705042000122002



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

**MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT TIGA UNSUR TERENDAH SURVEI
IKM DAN IPAK TRIWULAN III TAHUN 2024**

I. PENDAHULUAN

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Negeri Simalungun, perlu meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

II. TUJUAN MONITORING DAN EVALUASI

Tujuan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk menumbuhkan semangat kinerja yang tinggi dan berdisiplin serta bertanggungjawab dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

III. HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Dari hasil Monitoring dan Evaluasi periode Triwulan III 2024 di Pengadilan Negeri Simalungun, tidak ditemukan adanya kendala dalam Monitoring dan Tindak Lanjut Tiga Unsur Terendah Survei IKM dan IPAK.

IV. PENUTUP

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut tiga unsur terendah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Simalungun, 24 Oktober 2024

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,



Erika Sari Emsah Ginting

**DOKUMENTASI RAPAT
MONITORING DAN EVALUASI
TINDAK LANJUT TIGA UNSUR TERENDAH
SURVEI IKM DAN IPAK TRIWULAN III
TAHUN 2024**
Kamis, 24 Oktober 2024

